

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	news.detik.com
Media Cetak	

Distribusi Bansos DKI Dinilai Bermasalah, Istana: Harusnya Berdasarkan Data Akurat

Distribusi bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta menjadi sorotan karena dinilai tidak tepat sasaran. Istana menilai seharusnya tidak ada bansos yang salah didistribusikan. "Seharusnya tidak ada salah distribusi, ada yang berhak tidak dapat, ada yang tidak berhak dapat, artinya semuanya sudah berdasarkan data yang akurat dan terdistribusi dengan baik" ujar Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahril Adian saat dihubungi detikcom, Selasa (21/4/2020).

Donny mengatakan, pembagian bansos harus berdasarkan data yang akurat. Pendistribusian bansos, kata dia, saat ini menjadi tanggung jawab masing-masing kepala daerah.

"Kan diserahkan kepada kepala daerah, artinya distribusinya tanggung jawab kepala daerah sesuai dengan data yang pemerintah daerah miliki," kata Donny

"Masalah distribusi itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah, untuk masing-masing daerah melalui Dinas Sosial," sambungnya.

Diketahui, beberapa warga merasa berkecukupan selama masa pandemi Corona namun mendapat bansos dari Pemprov DKI Jakarta. Mereka memilih mengembalikan bansos tersebut agar disalurkan kepada yang membutuhkan.

"Iya, RW 7 di (Kelurahan) Kelapa Gading Barat termasuk RW elit. Dia dapat bantuan dari gubernur. Bukan menolak, menerima bukan memberikan apresiasi kepada pak gubernur atas perhatiannya, namun, dikembalikan untuk salurkan kembali kepada warga yang berhak. Bukan menolak," ucap Lurah Kelapa Gading Barat, Abdul Buang, saat dihubungi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani juga memberikan perhatian soal masalah data penerima bantuan sosial (Bansos) di DKI Jakarta. Bahkan pejabat tingkat bawah baru menerima data penerima H-1 sebelum dibagikan.

"Pembagian bansos DKI harusnya melalui proses verifikasi atau cek data real di lapangan. Yang terjadi sekarang camat/lurah/RW/RT menerima data, dan h-1 atau 2 membagikan. Sedangkan perangkat di bawah ini tidak tahu harus membagikan ke siapa, karena dapat data langsung harus dibagikan," ucap Zita saat dihubungi.

Menanggapi hal tersebut, Dinsos DKI Jakarta mengaku tidak ada kesalahan dalam pendataan. Dinsos meminta jika ada masyarakat yang dirasa belum membutuhkan tapi belum mendapat bansos, maka mereka harus melapor kepada Ketua Rukun Tetangga (RT), atau Rukun Warga (RW).

"Bukan kesalahan, jadi memang data dari berbagai sumber yang dipadankan oleh Kominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi), termasuk dari Disnaker (Dinas Tenaga Kerja), dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang dampaknya masih banyak sektor informal mampu kehidupannya, dan menolak untuk dapat bantuan," ucap Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos DKI Jakarta, Ika Yuli Rahayu, saat dihubungi, Selasa (21/4/2020).